



Salurkan BBM Tepat Sasaran

■ Bupati Launcing Program Bemtesar

SINTANG, TRIBUN - Bupati Sintang, Jarot Winarno melaunching program BBM Tepat Sasaran (Bemtesar) di Desa Samak, Kecamatan Kelayam Permai, Kabupaten Sintang, Rabu (18/5).

Bemtesar merupakan rancangan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus dalam strategi pendistribusian BBM tertentu melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Sintang.

Rancangan tersebut disusun sebagai peserta rancangan proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Angkatan II Tahun 2022.

Apabila draft tersebut disetujui dan mendapatkan dukungan dari OPD dan pemerintah, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

"Launching BBM tepat sasaran merupakan salah satu implementasi kami dalam mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara di Semarang. Salah satu output yang akan dihasilkan yaitu suatu kebijakan regulasi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat sintang tapi juga seluruh masyarakat kalbar," ujar Yustinus.

Menurut Yustinus, ada beberapa pokok persoalan



Launching BBM tepat sasaran merupakan salah satu implementasi kami dalam mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara di Semarang.â

Yustinus

Asisten II Sekretaris Daerah Sintang

dalam penyaluran BBM jenis tertentu di Kabupaten Sintang. Pertama, kuota BBM tertentu sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tinggi mengakibatkan kelangkaan. Belum lagi, harga antar desa dan kecamatan tidak satu harga.

Penyaluran BBM tertentu melalui Bumdes dianggap Yustinus dapat tepat sasaran. Dan hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi desa dalam mendapatkan PAD, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Yang kita launching hari ini salah satu strategi supaya penyaluran BBM tepat melalui Bumdes," ujarnya.

Pemerintah kabupaten sintang bersama Hiswana Migas, Pertamina kata Yustinus harus berkomitmen dalam pendistribusian BBM supaya tepat sasaran. Kedepannya, rancangan Bemtesar akan menjadi peraturan bupati.

"Apa yang akan kita lakukan kedepannya kita membuat regulasi yang dipergunakan untuk kepentingan terutama pendistribusian BBM. Kami mengambil salah satu lembaga yang memang dimiliki oleh desa yaitu bumdes dan itu memang sudah tertuang dalam peraturan BPH Migas. Ketika regulasi ini sudah jadi akan kita sosialisasikan ke masyarakat," ujarnya.

Hanya saja, kedepan hanya Bumdes yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkumham yang dapat menjadi penyalur BBM agar tepat sasaran. "Ini juga salah satu inovasi kita. Dari Pertamina wilayah kalbar juga mendukung program ini hanya memang salah satu regulasi yang ada di BPH migas aturannya masih kontradiktif. Mudah-mudahan dalam sebulan kedepan perbup bisa jadi dan dapat dipergunakan bila perlu diperdakan," harapnya. (ags)